



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUMDA SWATANTRA KABUPATEN BULELENG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GEDE BOBI SURYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 841128

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.300.000.000

1. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
5. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah Seluas 12840 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1780 m2/400 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 600.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/260 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 61.800.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA R 15 SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000



3. MOTOR, YAMAHA AEROX SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

4. MOTOR, HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 19.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 49.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.410.800.000

III. HUTANG

Rp. 482.750.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.928.050.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.